

**Metode Pencegahan Penyebaran Paham Islam Anti-Negara Kesatuan
Republik Indonesia Pasca Pembubaran Hizbut Indonesia Pada Pondok
Pesantren Salaf di Pamekasan**

***Methods of Preventing the Spread of Anti-Islamic Unity of the Republic of
Indonesia Post Dissolution of Indonesian Hizbut at Salaf Islamic
Boarding School in Pamekasan***

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: hudas_punyax@yahoo.co.id

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini menerangkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) gencar menyebarkan ajaran ideologi yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar bernegara ialah. HTI menemukan momentum pengembangan organisasi setelah mundurnya **Soeharto** sebagai President Republik Indonesia pada tahun 1998. Pasca peristiwa itu, gerakan HTI semakin massif dan disuarakan secara terang-terangan, baik melalui gerakan dakwah kampus ataupun gerakan di luar kampus, serta secara resmi mengumumkan eksistensinya pada tahun 2000. Organisasi ini secara gencar menyuarakan pentingnya pergantian bentuk NKRI menjadi negara kekhalifahan disertai klaim negara-negara yang tidak bersistem khilafah adalah negara *kufur*, *taghut*, dan tuduhan-tuduhan lain yang berusaha membawa vonis agama pada suksesi ideologi politiknya. Metode seperti ini sukses mempengaruhi umat muslim Indonesia dan HTI berhasil membentuk kepengurusan hampir di semua daerah di negeri ini. Adapun tujuan dari penelitian ini menerangkan bahwa ada beberapa pondok pesantren yang terpengaruh kampanye massif HTI di Pamekasan, upaya pencegahan paham khilafah oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan mengganti sistem, bentuk, dan falsafah negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Bagi orang Madura, pesantren merupakan sentral pengembangan Islam yang *mu'tabar*, sehingga apa saja yang diajarkan, didakwahkan, dan difatwakan oleh pengasuhnya merupakan ajaran yang dianggap benar dan tidak perlu diragukan. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian non-doktrinal. Metode penelitian ini dipilih karena subjek rencana penelitian yang berupaya menelusuri dan mengkaji model serta metode pencegahan masuknya paham Islam anti-NKRI dalam lingkungan pondok pesantren salaf di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini mempunyai lauran yang ingin dicapai yaitu agar pesantren tidak dimanfaatkan oleh elit HTI dalam upaya menyampaikan gagasannya, yang telah nyata bertentangan dengan ideologi bernegara serta bertentangan dengan paham Islam keindonesiaan yang memposisikan antara agama dan negara pada posisi yang seimbang, sejajar, dan tidak mempertentangkan antar keduanya. Merupakan hal untuk membentengi kaum pesantren dari bahaya laten penyebaran paham islam anti-NKRI sebagaimana dilakukan oleh HTI, oleh karenanya kelanjutan dari penelitian perlu dilakukan kajian mendalam mengenai konsep-konsep dan metode khusus sebagaimana telah dilakukan oleh pesantren-pesantren salaf yang ada di Pamekasan dalam mencetak santri sebagai intelektual muslim yang memiliki pemahaman moderat, dan cinta tanah air.

Kata Kunci, Pencegahan Anti-NKRI, HTI, Pondok Pesantren Salaf.

Abstract

The background of this research explains that Hizb At-Tahrir Indonesia (HTI) is aggressively spreading ideological teachings aimed at replacing Pancasila as the basis of statehood. HTI found the momentum of organizational development after Suharto's resignation as President of the Republic of Indonesia in 1998. After this event, the HTI movement became more massive and was openly voiced, both through the campus missionary movement and the off-campus movement, and officially announcing its existence in 2000 This organization aggressively voiced the importance of changing the form of the Unitary Republic of Indonesia to the caliphate state along with the claims of countries that did not have a khilafah system, namely the kufr, taghut, and other accusations that tried to bring religious verdicts to the succession of political ideology. This method successfully influenced Indonesian Muslims and HTI succeeded in forming management in almost all regions in the country. The purpose of this study explains that there are several Islamic boarding schools affected by the massive HTI campaign in Pamekasan, efforts to prevent the Khilafah from understanding the government because it is feared that it will change the system, form and philosophy of the Indonesian state based on Pancasila. For Madurese, pesantren are central to the development of Islam that is not patient, so that whatever is taught, preached, and stated by their caregivers is a teaching that is considered true and need not be doubted. This research uses empirical methods or non-doctrinal research. This research method was chosen because the subject of the research plan that seeks to explore and study models and methods of preventing the entry of anti-NKRI Islamic understanding in the environment of the Salaf boarding school in Pamekasan Regency.

This research has a goal to be achieved, namely that pesantren are not used by the HTI elite in an effort to convey their ideas, which are in fact contrary to

the ideology of the state and contrary to the understanding of Indonesian-Islamic Islam which positions religion and state in a balanced, equal, and non-conflicting position between both. It is to fortify pesantren from the latent dangers of spreading anti-NKRI Islamic understanding as carried out by HTI, therefore the continuation of the research needs to be carried out in-depth study of special concepts and methods as has been done by salaf pesantren in Pamekasan in printing students as Muslim intellectuals who have a moderate understanding, and love the motherland.

Keywords, *Anti-NKRI Prevention, HTI, Salaf Islamic Boarding School.*

PENDAHULUAN

Pasca jatuhnya **Soeharto** sebagai Presiden RI selain membawa beberapa perubahan besar berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menyisakan beragam dampak kebebasan tanpa batas. Salah satu persoalan ialah munculnya kembali ideologi-ideologi yang hendak mengganti Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia (Agus Purnomo, 2014: 4).

Salah satu organisasi yang gencar menyebarkan ajaran ideologi yang bermaksud mengganti Pancasila sebagai dasar bernegara ialah Hizbut Tahrir Indonesia (Cekly Setya Pratiwi, 2015:205). Organisasi ini secara gencar menyuarakan pentingnya pergantian bentuk NKRI menjadi negara kekhalifahan disertai klaim negara-negara yang tidak bersistem khilafah adalah negara *kufur*, *taghut*, dan tuduhan-tuduhan lain yang berusaha membawa vonis agama pada suksesi ideologi politiknya (Muwaffiq Jufri, 2017:3)

Massifnya HTI dengan kampanye yang ingin mengganti sistem bernegara menjadi negara kekhalifahan menimbulkan beragam pertentangan yang berakibat pada banyaknya aksi-aksi penolakan terhadap

segala bentuk aktivitas HTI di berbagai penjuru Nusantara. Bahkan ada beberapa aksi penolakan tersebut harus melibatkan personel kepolisian.

Ragam pertentangan dan penolakan itu pada akhirnya memaksa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Penerbitan Perppu ini kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30.AH.01.08 tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Melalui keputusan ini, badan hukum HTI secara resmi dinyatakan *illegal*.

Kabupaten Pamekasan menyatakan diri sebagai daerah yang hendak mengupayakan formalisasi syari'at Islam (Ery Hariyanto, 2009:78). Beragam cara dilakukan untuk mensukseskan program itu, baik melalui upaya formal kenegaraan ataupun melalui upaya pengembangan sosial.

Pada jalur formal kenegaraan, telah ada beberapa Perda yang memuat prinsip syariat Islam, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2014 tentang Keterampilan Baca Al-Quran Bagi Anak Didik Muslim.

Korelasi dari usaha penerapan syariat Islam di Pamekasan dengan kampanye ideologi politik HTI yang ingin mewujudkan kehidupan bernegara dengan sistem khilafah ialah terbukanya akses dan penyampaian gagasan khilafah secara bebas kepada masyarakat dengan memanfaatkan program Gerbang Salam yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan (*Media Madura*, 12 April 2018).

Keberadaan beberapa pengasuh pondok pesantren di Pamekasan yang terpengaruh kampanye massif HTI merupakan persoalan tersendiri bagi upaya pencegahan paham khilafah oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan mengganti sistem, bentuk, dan falsafah negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hal ini disebabkan oleh strategisnya peran pesantren dalam transformasi pemahaman keislaman (Tufiqurrahman, 2006 : 4)

Karenanya membentengi kaum pesantren dengan pemahaman yang cukup dan berimbang mengenai HTI dan ideologi politik khilafahnya, adalah suatu cara agar keberadaan pesantren tidak dimanfaatkan oleh elit HTI dalam upaya menyampaikan gagasannya, yang telah nyata bertentangan dengan ideologi bernegara serta bertentangan dengan paham Islam keindonesiaan yang memposisikan antara agama dan negara pada posisi yang seimbang, sejajar, dan tidak mempertentangkan antar keduanya.

Guna membentengi kaum pesantren dari bahaya laten penyebaran paham islam anti-NKRI sebagaimana dilakukan oleh HTI, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai konsep-konsep dan metode khusus sebagaimana telah dilakukan oleh pesantren-pesantren salaf yang ada di Pamekasan dalam mencetak santri sebagai intelektual muslim yang memiliki pemahaman moderat, dan cinta tanah air.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Pondok Pesantren Salaf

Radikalisme Islam menurut kalangan pesantren salaf terutama pesantren pamekasan adalah model pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman Islam moderat yang lebih cenderung memiliki karakter *tasamuh*, *tawasut* dan *tawazun*. Sebagaimana dikemukakan KH. Atiqurrahman dalam hasil wawancara yang disampaikan pada peneliti,

bahwa islam anti-NKRI merupakan pemahaman yang sifatnya tekstualis, dan seringkali menggunakan instrumen kekerasan dalam melakukan atau memberikan ajaran-ajarannya. Hal ini berbeda dengan cara dakwah Walisongo. Dalam pandangan dakwah menurut Walisongo dalam mengajarkan ajaran Islam dilakukan dengan cara yang ramah, tidak dengan cara kekerasan dan sangat akomodatif dengan budaya lokal bahkan budaya dijadikan sebagai media dalam berdakwah.

Menurutnya aksi islam antri-NKRI yang terjadi di dalam Islam banyak disebabkan oleh interpretasi umat Islam terhadap kitab suci dan Sunnah Nabi yang tekstual, skriptural dan kaku. Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditafsirkan secara kontekstual yang melibatkan historisitas teks dan dimensi kontekstualnya. Ayat-ayat yang cenderung mengarah pada aksi kekerasan, seperti mereka cara memandang ayat tentang *kafir/kufur*, *syirik* dan *jihad*, dan sehingga mereka sering menafsirkan apa adanya, dengan tanpa melihat pada konteks sosiologis dan historisnya yang terjadi. Apa yang mungkin tersirat di balik "penampilan-penampilan tekstualnya" hampir-hampir terabaikan, bahkan terlupakan. Dalam contohnya yang ekstem, kecenderungan seperti itu telah menghalangi sementara kaum muslimin untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan Al-Qur'an sebagai instrumen *ilahiyyah* yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia. Pemahaman tekstual seperti ini biasanya dimiliki oleh kalangan Wahabi dan kalangan modernis yang memiliki pandangan kembali pada Al-Qur'an dan Hadist dengan interpretasi tekstualis.¹

Islam anti-NKRI dalam Islam seringkali muncul atas pandangan sempit tentang ajaran Islam. Misalkan ajaran tentang jihad, hubungan dengan non muslim, pemberlakuan syariat Islam, penerimaan Pancasila dan UUD 1945

¹ Wawancara dengan KH. Abdul Hamid pada tanggal 17 Juli 2019

sebagai dasar negara.² lebih banyak dimaksudkan sebagai perintah untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik-praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas). Kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* ini dipahami secara skriptual dan totalistik. Perjuangan inilah yang kemudian dipahami oleh mereka sebagai kembali kepada Islam secara *kaffah*, yakni obsesi kembali ke masa lalu secara keseluruhan tanpa melihat perubahan sosial-budaya yang telah dialami masyarakat muslim dewasa ini.³

Konstruksi pemahaman Islam anti-NKRI yang didasarkan pada penafsiran tekstual itulah yang kemudian mendapatkan semangatnya dalam doktrin jihad untuk memperjuangkan Islam *kaffah*. Atas nama jihad, menurut mereka seseorang dibenarkan melakukan aksi Islam anti-NKRI. Jihad menjadi ideologi dan instrumen yang menggerakkan untuk melakukan aksi radikal demi mengubah tatanan yang sekuler menjadi tatanan yang islami.

Bertolak dari pemahaman jihad, menurut pandangan KH Abdul Hamid bahwa jihad dalam agama Islam adalah perintah yang telah termaktub dalam syariat Islam. Nyatanya jihad dipahami ialah secara variatif oleh masyarakat, tak terkecuali oleh para pendidik agama yang bisa disebut dengan sebutan kyai, ustadz, guru agama. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan pemahaman jihad sesungguhnya dipengaruhi oleh tingkat penguasaan agama, pengalaman tentang agama, transfer ilmu yang diterima, dan kondisi sosial yang dihadapi ada era sekarang.

Dalam pandangan pesantren salaf di Pamekasan bahwa pengertian jihad seharusnya tidak dapat hanya dipahami secara sempit sebagai perang saja, akan tetapi juga dimaknai dengan pengertian yang luas dan mencakup seluruh kegiatan yang menunjukkan perjuangan kepada jalan Allah,

² Wawancara dengan KH. Atiqurrahman, pada tanggal 18 Juli 2019

³ KH. Atiqurrahman adalah salah satu putra KH. Masruri Abdul Muhgni selaku dewan pengasuh dan sekaligus sebagai Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Al-Anwar.

terutama dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh pesantren salaf di pamekasan, sedangkan jihad dalam pengertian perang dipahami hanya ketika umat Islam diserang oleh musuh sebagaimana dahulu saat menghadapi penjajah.⁴

Selain yang berkaitan dengan jihad, diskursus yang seringkali menimbulkan Islam anti-NKRI adalah pandangan umat Islam tentang hubungan dengan non-muslim atau sesama muslim, baik dalam percampuran sosial, politik dan keagamaan. Dalam pandangan Islam anti-NKRI, justru umat Islam sebisa mungkin untuk menghindari bergaul dengan non-muslim karena bisa jadi akan mempengaruhi akidah umat Islam termasuk dalam tataran politik. Mereka kemudian menganggap dalil yang dijadikan pedoman adalah Q.S. Al-Maidah ayat 51, seperti misalnya yang menurut pemahaman mereka umat Islam tidak boleh memilih pemimpin kafir.

Sementara itu pandangan Pesantren Salaf bahwa pergaulan sosial dengan non-muslim, seperti berdagang, bertransaksi, bergaul, berteman, dan lain sebagainya pada prinsipnya tidak ada masalah. Dalam hal memilih pemimpin muslim, perlu kita pahami bahwa negara Indonesia ini adalah dengan menggunakan sistem demokrasi yang setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin baik muslim maupun non muslim. Akan tetapi umat Islam sebaiknya memilih pemimpin yang beragama Islam selagi memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam yakni amanat, jujur, adil dan selalu berfikir untuk kepentingan rakyat.

Dalam hal pemberlakuan syari'at Islam menjadi idiologi negara, menurut pandangan kaum Islam anti-NKRI adalah diniscayakan sebagai upaya menjalankan Islam *kaffah*. Alasannya karena dengan diberlakukannya syari'at Islam sebagai dasar negara, segala persoalan dapat diselesaikan

⁴ Wawancara dengan KH. Solahudin pada tanggal 16 Juli 2019 dan dokumentasi profil PP. Al-Anwar

dengan kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, karena menurut mereka didalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* telah meliputi segala aspek kehidupan.

Berbeda dengan pandangan Pesantren salaf bahwa sekalipun negara Indonesia bukanlah negara Islam akan tetapi telah menjalankan nilai-nilai islami. Negara Indonesia bukanlah negara Islam akan tetapi negara "*Darussalam*" yaitu negara yang aman, damai yang masyarakatnya menjalankan nilai-nilai ajaran Islam tanpa melakukan kekerasan dalam menjalankan perjuangan. Sehingga sebuah negara tidak harus dipaksakan untuk memberlakukan Islam sebagai landasan negara secara formal, yang penting adalah masyarakatnya menjalankan nilai-nilai ajaran Islam dan hukum negara yang secara substantif tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengingat Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku agama, etnis, budaya yang tidak mungkin bisa menerima Islam sebagai asas tunggal dalam negara karena akan mengalami penolakan dari golongan berbasis non muslim. Di sinilah cara umat Islam yang seharusnya menyadari demi terciptanya persatuan dan kesatuan negara Indonesia, maka tidak harus memaksakan syariat Islam menjadi asas negara.⁵

Dalam diskursus pemberlakuan sistem *khilafah* sebagaimana sedang banyak diperbincangkan dan sedang diperjuangkan oleh kaum radikal, Pesantren Salaf sebagaimana dituturkan KH. Atiqurrahman berpandangan bahwa Indonesia tidak perlu adanya sistem *khilafah*, karena di dalam sumber Islam sendiri tidak ditemukan sistem pemerintahan yang mengatur negara. Meskipun dalam sejarah Islam terdapat fenomena *khilafah*, tetapi tidak ditemukan konsep *khilafah* yang baku, misalkan sistem pemerintahan *khulafurrasyidin*. Dalam perjalanannya, sistem pemerintahannya terdapat perbedaan dalam sistem pengangkatan seorang khalifah dari satu khalifah ke khalifah yang lainnya, misalkan Khalifah Abu Bakar dipilih secara

⁵ Wawancara dengan KH. Abdu Salam pada tanggal 25 Juli 2019

musyawarah mufakat, Khalifah Umar dipilih melalui mandat dari Abu Bakar, Khalifah Usman dipilih melalui tim (*ahlul hal wal aqdi*), Khalifah Ali dipilih secara aklamasi atau mayoritas umat. Berlanjut pada kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang cenderung *monarchi* (turun temurun dalam sistem kerajaan). Jadi pada prinsipnya sistem kepemimpinan *khalifah/khilafah* secara baku dalam ajaran Islam tidak ditemukan.⁶

Negara Indonesia dengan bentuk negara demokrasi adalah bentuk yang sesuai dengan keadaannya yang beragam. Pancasila, UUD 1945 adalah dasar negara yang tepat untuk menyatukan berbagai perbedaan agama, suku, budaya dan pulau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Oleh karena itu munculnya radikalisme adalah disebabkan karena pemahaman yang sempit, tekstual, skriptual, kaku dan tanpa melihat aspek historisitas dan sosial kultur sebuah ajaran. Pemahaman semacam itulah kemudian memunculkan interpretasi sikap keagamaan yang galak dan keras, yang pada gilirannya melahirkan aksi kekerasan, radikal bahkan teror. Tegasnya, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan telah menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan dimana-mana. Ditambah lagi dengan kecenderungan kelompok skripturalis yang lebih suka dan akrab dengan ayat-ayat pedang (jihad), pengkafiran (*takfir*), dan pemusrikan (*tasyrik*). Mereka lebih suka memilih ayat-ayat yang memiliki kandungan berbuat keras ketimbang ayat-ayat yang pro-perdamaian.

B. Pandangan Pesantren Salaf terhadap Islam anti-NKRI

Pesantren Salaf di Pamekasan dengan tegas menolak Islam anti-NKRI karena tidak sesuai dengan watak dasar pendidikan pesantren salaf yang lebih menunjukkan karakter ramah, akomodatif dengan budaya lokal, toleran menebar kasih sayang dan mau menghormati orang lain meskipun berbeda. Dalam pandangan ini telah dituturkan oleh salah seorang pengasuh

⁶ Wawancara dengan KH. Atigurrahman pada tanggal 17 Juli 2019

Pesantren Salah, yaitu KH Solahudin²¹ bahwa karakter otentik pesantren salaf adalah jauh dari tradisi kekerasan. Sejak awal, kalangan pesantren sangat minim sesungguhnya menampilkan wajahnya yang toleran, terutama pesantren yang memiliki kedekatan emosional dengan Nahdlatul Ulama (NU).⁷ Ia lebih menampilkan wajah yang toleran dan menampilkan sikap yang seimbang dengan budaya setempat sehingga pesantren mengalami pembauran dengan masyarakat secara baik. Jika kemudian belakangan muncul pesantren yang mengajarkan doktrin-doktrin ekstrimisme dan radikalisme, hal itu tidak lain merupakan penyimpangan karakter pesantren yang asli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pesantren telah banyak berperan di bidang transformasi sosial dan kultural. Pesantren selalu menunjukkan apresiasi terhadap kebudayaan lokal, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Walisongo dalam mengajarkan agama Islam. Pesantren melakukan sikap akomodatif atas kebudayaan dan tradisi lokal tersebut, tanpa kehilangan keyakinan tauhidnya. Melalui ajaran-ajaran keislaman, pesantren menganggap bahwa praktek tradisi dan ekspresi budaya dalam masyarakat bukanlah masalah yang harus diperdebatkan tanpa akhir, sepanjang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip tauhid.

Di sisi lain penerimaan kalangan pesantren terhadap dasar negara Indonesia; UUD 1945 dan Pancasila merupakan bentuk akomodasi antara ajaran Islam dengan realita yang ada di Indonesia. Kalangan pesantren menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa yang terdapat dalam Pancasila juga sudah terdapat di dalam ajaran Islam.

⁷ Pesantren Al-Anwar memiliki kedekatan dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Karena salah satu pengasuhnya pernah menjabat sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Pamekasa, suatu jabatan tertinggi dalam NU

Tampak sekali bahwa pesantren Salaf di Pamekasan melihat persoalan-persoalan ini dari aspek substansinya, bukan semata-mata bentuk formalitasnya. Oleh karena itu pesantren cenderung bersikap akomodatif, moderat dan menolak secara tegas sikap radikal atau anti-NKRI karena akan tidak menguntungkan umat Islam sendiri dalam kehidupan yang pluralistik. Pandangan pesantren sebagaimana menurut KH. Solahudin, karena pesantren memiliki akar ajaran teologis *Ahlussunnah Wal Jamaah*, yakni pemahaman agama Islam yang menjunjung tinggi asas-asas moderasi dalam cara berfikir, bertindak, dan bersikap. Bentuknya adalah moderat, keseimbangan, dan toleran.

Penolakan terhadap radikalisme ini terlihat dari sikap para pengasuh Pesantren dan santri pesantren salaf di Pamekasan yang tidak menerima ajaran-ajaran yang memicu ekstrimisme, brutal bahkan terorisme. Sikap keagamaan seperti itu muncul karena pemahaman yang dangkal, kaku, dan skriptual pada akhirnya akan menyengsarakan umat Islam itu sendiri. Sebagai salah satu contoh konsep mengenai jihad, jika dipahami secara tekstual dan dangkal maka maknanya adalah perang. Pemahaman ini akan memunculkan ekstrimisme dan berusaha akan memerangi orang-orang yang dianggap musuh, semisal non-muslim bahkan sesama muslim yang berbeda dengan pemahamannya.

C. Upaya Pesantren Salaf dalam Melindungi Para Santri dari Islam Anti-NKRI

Pesantren salaf adalah sebagai lembaga pendidikan keagamaan sejak dahulu memainkan peranan yang sangat strategis terutama dalam mempengaruhi pola pikir, pengetahuan, pemahaman, dan perilaku keagamaan masyarakat muslim yang berada di Indonesia. Melalui pendidikan yang diselenggarakannya, pesantren berperan sebagai alat transformasi kultural dan sosial yang menyeluruh dalam kehidupan

masyarakat, tidak hanya dalam bidang agama (*tafaqquh fi al-din*), tetapi dalam segala aspek kehidupan.

Transformasi sosial yang telah dilakukan oleh pesantren dapat bermula dari watak pendidikan pesantren yang populis dan dapat dilihat sebagai miniatur masyarakat, hal mana para santri dengan fasih dapat belajar untuk sosialisasi dengan lingkungan internal maupun eksternal pesantren. Sebagai miniatur masyarakat, pesantren memiliki dinamika tersendiri dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Di tengah arus perubahan sosial dan tarik menarik pengaruh wacana keagamaan, pesantren memiliki peranan dalam membentuk karakter keagamaan santri dan masyarakat secara umum, terutama ditengah-tengah maraknya gerakan radikalisme yang berkembang.

Pesantren Salaf di Pamekasan sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan pemahaman Islam yang moderat dengan berpegang teguh pada ajaran *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang berkarakter *tawazun*, *tawasut* dan *tasamuh* dihadapkan pada persoalan radikalisme yang berkembang di masyarakat yang sejatinya sangat bertolak belakang dengan watak dan tradisi pesantren yang selama ini dikenal.

Menjadi penting pesantren salaf yang memiliki fungsi untuk membangun kerangka pikir dan prilaku santri/masyarakat yang religius melakukan upaya preventif terhadap pemahaman-pemahaman radikal. Upaya-upaya yang dilakukan pesantren salaf dalam melindungi santri dari paham radikalisme adalah sebagai berikut :

a. Melalui Kurikulum Pendidikan

Kurikulum Pendidikan menjadi modal sangat utama dan pertama dalam membangun kerangka pikir dan prilaku masyarakat, terutama santri yang akan terjun ke tengah masyarakat.

Kurikulum pendidikan yang ada di Pesantren salaf pada dasarnya bersifat fundamental dan berpotensi dimaknai secara

radikal, terutama yang bertumpu pada mata pelajaran akidah/ tauhid, fikih dan tafsir. Tiga mata pelajaran ini yang menyediakan perangkat pengetahuan untuk merespons kondisi sosial masyarakat. Tiga mata pelajaran ini pula yang menyediakan konstruksi pemahaman keagamaan yang berpotensi pada kecenderungan pemahaman radikal, terutama dalam membahas persoalan jihad, kafir dan hukum Islam, apalagi jika dipahami secara dogmatis dan radikal, maka akan memiliki potensi radikalisme. Sebaliknya jika dipahami secara kontekstual atau moderat, bisa meminimalisasi potensi radikalisme.

Dalam menangkal pemahaman yang radikal dari ketiga materi tersebut maka perlu adanya penyeimbang sebagai upaya memahami ajaran Islam secara komprehensif. Di Pesantren salaf, ketiga materi/ mata pelajaran itu telah mendapatkan penyeimbang, misalkan materi *fiqh* dimbangi dengan materi *ushul fiqh*.

Dalam mata pelajaran/kitab *ushul fiqh* terdapat kaidah-kaidah *istinbat al-hukm* (cara pengambilan hukum) selain dari al-Qur'an dan Hadits seperti *ijma'*, *qiyas*, *urf*, *masalah mursalah*, *maqasyidu al-syar'i* sehingga dalam memahami hukum Islam (*fiqh*) tidaklah kaku. Ada kaidah yang menyelaraskan antara teks dan kenyataan.

Dalam pengajaran akidah, untuk menangkal pemahaman yang radikal, diimbangi dengan materi *tasawuf* atau akhlak. Karena dengan tasawwuf dan akhlak, santri diajarkan bagaimana seorang hamba semestinya dihadapan Sang Khaliq dengan baik dan bagaimana seseorang bersikap dan berhubungan baik dengan sesama manusia (*hablum minallah, hablun minannas*). Dari sini, maka sikap dan gerakan seseorang akan merasa adanya kehadiran Allah dan dapat bersikap baik terhadap sesama manusia meskipun dengan orang yang berbeda agama.

Bidang yang ketiga adalah tafsir. Seringkali tafsir al-Qur'an maupun al-Hadits dipahami secara tekstual. Untuk menghindari pemahaman yang tidak komprehensif dan terhindar dari pemahaman radikal maka dalam mengkaji al-Qur'an maupun al-Hadits diperlukan seperangkat ilmu yang menjadi syarat dalam menafsirkan al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya adalah ilmu *asba>bun al-nuzu>l*, *asbabu al-wuru>d*, *nasah mansuh*, sejarah (*tarikh*), *qira>"ati*, *mustalahul hadis*/, *rija>lul hadis*/ disamping *mantiq* dan *bayan* bahkan *ushul fiqh*. Dengan seperangkat ilmu itu diharapkan al-Qur'an maupun al-Hadits dapat dipahami secara komprehensif dan utuh, sehingga secara substansi dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kondisi zaman (*s}a>lih li kulli zaman*) sesuai dengan historisitas sebuah teks.

b. Rekrutmen Dewan Guru/ Asatidz

Upaya berikutnya dalam melindungi santri dari pemahaman radikal di Pondok Pesantren Salafadalah adanya seleksi terhadap para guru/ ustadz²³, terutama guru/ ustadz yang mengajar di sekolah formal, sementara para ustadz yang mengajar di dalam pondok direkrut dari santri senior, alumni maupun ustadz lulusan dari lembaga pendidikan lain. Dalam hal merekrut para guru/ ustadz, Pondok Pesantren Salaf mendasarkan pada kompetensi dan latar belakang pendidikan terutama aliansi atau "nasab" idiologi ustadz tersebut. Tenaga pendidik (guru) direkrut dari mereka yang memiliki paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan tidak berpaham radikal.

Paham keagamaan seringkali berhubungan dengan pandangan dan sikap seseorang atau kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dalam melihat persoalan yang dihadapi. Latar belakang keagamaan dan pendidikan seorang ustadz menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam rangka untuk melindungi pemahaman santri

dari radikalisme. Jika ditemukan terdapat seorang guru berpaham radikal (dalam kasus di Pondok Pesantren Salaf misalkan para ustadz yang memiliki aktifitas diluar pesantren adalah bagian dari HTI, FPI, HTI, MMI dan sebagainya) maka pihak pesantren dengan tegas akan mengeluarkan ustadz tersebut dengan alasan yang tepat berpotensi mempengaruhi para santri. Konsep yang tersedia dalam kurikulum pendidikan pesantren berpotensi dimaknai dengan pemahaman konservatif, literal dan dogmatis, terutama dalam menanggapi isu-isu keagamaan dan politik oleh para ustadz tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa ormas-ormas Islam seperti FPI, HTI, HTI, MMI merupakan organisasi yang berhaluan radikal. Mereka sangat getol dalam memperjuangkan berdirinya Negara Islam/Negara Khilafah, formalisasi syariat Islam dan sering berlaku anarkis dalam upaya *Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar* serta eksklusiv dan literal dalam memahami sebuah teks sehingga seringkali berbuat memaksakan kehendak dalam menerapkan ajarannya ditengah-tengah masyarakat.

Dengan alasan-alasan inilah pesantren salaf selektif didalam merekrut para ustadz yang akan mengajar para santri. Bagaimanapun guru adalah sosok teladan yang akan ditiru para santri dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman guru yang radikal akan ditiru oleh santri menjadi radikal. Pola keagamaan santri akan dipengaruhi oleh seorang pendidik yang mengajarkan tentang agamanya.

c. Perlindungan Melalui Pergaulan dan Kominfo

Pesantren adalah sebagai subkultur sebagaimana diistilahkan Abdurrahman Wahid memiliki tradisi dan pergaulan tersendiri.⁸ Pola pergaulan dan tradisi yang ada di pesantren terpisah dari kehidupan masyarakat di luar pesantren. Nilai-nilai yang berkembang di

⁸Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan" dalam *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, ed. Marzuki Wahid dkk (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 13

pesantren merupakan desain pengasuh atau pendiri pesantren, sehingga watak atau karakter keagamaan pesantren bersumber dari pandangan para kyai (pengasuh) tersebut. Nilai-nilai itu kemudian dikembangkan dalam proses pergaulan di pesantren. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam Pesantren Salaf adalah nilai-nilai yang mendasarkan pada paham Islam *ahlussunnah wal jamaah* yang memiliki karakter moderat, sehingga nilai-nilai yang berseberangan dengan karakter *ahlussunnah wal jam'ah* tidak bisa diterima di pesantren ini, apalagi paham yang mengajarkan radikalisme.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren merupakan tempat berkumpulnya para santri yang sedang belajar agama (Islam). Pola pergaulan di pesantren tidak bisa lepas dari keberadaan santri itu sendiri. Pola pergaulan santri di Pondok Pesantren Salaf tidak bisa dipisahkan dengan beberapa faktor yang melingkupinya, antara lain kyai, ustadz, santri dan lingkungan. Dalam proses pembelajarannya, faktor-faktor tersebut akan saling berinteraksi, sehingga terdapat berbagai interaksi atau pergaulan yang terjadi di dalam pesantren, baik interaksi santri dengan kyai, santri dengan ustadz, santri dengan sesama santri, maupun santri dengan lingkungan. Interaksi yang terjalin di pesantren ini ada yang bersifat individual maupun kelompok.

Dalam proses pergaulan sosial yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Salaf ini pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor intern santri dalam hal ini meliputi semua hal, baik perkataan, perbuatan, atau perilaku dan kepribadian. Faktor intern ini dalam prosesnya sebenarnya merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dengan faktor ekstern. Sedangkan faktor ekstern adalah semua hal yang berada di luar santri, baik lingkungan keluarga, sekolah pesantren

maupun lingkungan masyarakat secara luas yang telah ikut membentuk kepribadian santri.

Proses berikutnya, perilaku santri Pesantren salaf ini juga dipengaruhi oleh kepribadian bawaan, yaitu kepribadian yang dibawa oleh santri sebelum dia masuk dan menjadi santri di Pesantren Salaf,⁹ dan pola interaksi yang dibangun dan diberlakukan oleh pengelola Pondok Pesantren Salaf sendiri, baik peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, pola pergaulan yang terakhir ini membutuhkan waktu bagi para santri untuk beradaptasi dan melakukannya.

Dalam pergaulan yang dibangun, untuk mencegah masuknya paham radikal pada diri santri dilakukan dengan mendeteksi pola perilaku santri melalui kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran sehari-hari oleh para ustadz dan kyai. Pendeteksian ini tidaklah sulit. Interaksi sosial dengan para kyai dan ustadz di dalam pesantren merupakan sebuah keharusan. Santri sebagai pihak yang mencari ilmu, sedangkan para pendidik (kyai dan para ustadz) sebagai pihak yang memberi dan mengajarkan ilmu. Sebagai seseorang yang mencari ilmu, santri harus mematuhi berbagai norma, aturan, tata nilai yang ada di pesantren; baik norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis, baik nilai-nilai yang terkandung dalam kitab yang dipelajari maupun nasihat yang diberikan kyai, sehingga diharapkan akan mudah mendeteksi radikalisme dan bagaimana upaya pencegahan serta pembinaannya.

Sebagai pesantren yang berlandaskan paham *ahlussunnah waljama'ah*, yang berkarakter moderat serta memiliki misi

⁹Kepribadian bawaan yang dibawa sebelum memasuki Pesantren Al-Anwar terkadang telah membawa pemahaman yang radikal oleh karena pengaruh dari pergaulan sebelumnya. Misalkan mereka yang sebelum mondok telah banyak membaca pemikiran-pemikiran radikal, baik melalui media sosial, majalah maupun buku-buku berpaham radikal dan pemahaman dari para ustad yang berpaham radikal.

mendukung program pembangunan nasional dengan menyediakan sumberdaya insani yang luwes dalam bersikap, tentunya menolak paham-paham radikal apalagi yang mengarah pada penolakan terhadap dasar negara Pancasila, UUD 1945. Secara tegas Pondok Pesantren Salaf melakukan pencegahan terhadap paham-paham radikal tersebut terhadap para santri yang terdeteksi memiliki pemahaman radikal untuk kemudian dibina agar memiliki sikap dan pandangan yang moderat.¹⁰

Disamping pencegahan pemahaman dan sikap radikal melalui pergaulan, upaya untuk mencegah radikalisme di Pondok Pesantren Salafa adalah dengan memantau media yang berkembang di pesantren. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyeleksi bacaan, referensi dan informasi yang masuk ke pesantren. Para ustadz diberi arahan agar hati-hati dalam memberikan media informasi kepada para santri jangan sampai materi dalam media itu berisi paham-paham radikal, tak terkecuali melalui media sosial yang dimilikinya. Medsos sebagai media yang dimiliki Pondok Pesantren Salaf didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang baik dan sekaligus sebagai media dakwah yang mengembangkan gagasan-gagasan pesantren termasuk di dalamnya adalah pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para kyai dalam menyampaikan paham-paham Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Disamping medosos, beberapa media yang dimiliki dan berkembang dilingkungan pesantren adalah, majalah-majalah, internet dan komputer. Keberadaan media-media tersebut pada dasarnya adalah sebagai media pengembangan pendidikan pesantren dan media dakwah terutama dalam merespons dinamika yang berkembang dimasyarakat, tak terkecuali

¹⁰Dalam hal pembinaan terhadap santri yang memiliki pandangan bawaan radikal sejak sebelum mondok adalah dengan diajak diskusi dengan kyai/ para ustadz untuk kemudian diberi wawasan dan pandangan tentang Islam yang ramah (*Islam rahmatan lil alamin*)

diskursus radikalisme. Dalam konten media-media itu disebarkan gagasan-gagasan, ide-ide, wacana-wacana/kasanah akhlakul karimah dan khasanah *Islam rahmatan lil alamin*.

Dengan media-media tersebut Pesantren melakukan *counter* wacana radikalisme dengan mengembangkan wacana „*ubudiyah, muamalah*; humanisme, etika (akhlak) bermasyarakat, kerukunan, toleransi, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat meskipun berbeda, nasionalisme dan bagaimana menjadi warga negara yang baik.

Selain dari beberapa pandangan yang telah terurai di atas ada beberapa hal lain yang harus kita pahami lewat penelitian ini, antara lain ialah rangka menghindari atau paling tidak meminimalisasi penyebaran islam anti-NKRI di lingkungan Pesantren, Pesantren secara kelembagaan dan melalui para Pengurus, Ustad terus-menerus berupaya melakukan langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran aliran sesat ini dengan harapan agar seluruh santri (Santri, Ustad dan masyarakat) dapat terhindar dari pengaruh aliran sesat yang sangat merugikan baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun institusi.

Strategi pencegahan penyebaran aliran sesat dan menyesatkan di Pesantren Salaf di Pamekasan yang paling mendasar adalah dengan cara memberikan pemahaman Islam yang komprehensif (*syumuliyah*) dan terus menerus, baik yang dilakukan secara klasikal atau kelompok. Upaya untuk meningkatkan pemahaman ajaran Islam di Pondok Pesantren salaf dilakukan dengan berbagai cara yang dikemas dengan berbagai kegiatan, baik yang dilakukan secara rutin maupun temporer atau kondisional, baik formal maupun non formal, antara lain:¹¹

Pertama, secara formal melalui asistensi Pendidikan Agama Islam. Pendalaman Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Santri, hal ini merupakan amanat UU RI No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas), Bab X Pasal 37

¹¹Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Yogyakarta: Media Abadi, 2005)

poin 2 yang menyatakan : Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat: (1) Pendidikan agama; (2) Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) Bahasa.

Dengan ditetapkannya pendalaman Pendidikan Agama Islam pada Pesantren sebagai kurikulum pendidikan inti (*wajib*) menunjukkan sesuatu yang sangat penting: (1) secara langsung dapat dipandang sebagai sarana yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan terciptanya sumberdaya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlakul karimah. (2) memberikan landasan nilai kepada Santri dalam mengembangkan disiplin ilmu dan keterampilan yang dipelajarinya. (3) Membangun karakter yang mulia (akhlakul karimah). (4) membentengi diri dari pengaruh budaya atau aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, yang membahayakan baik bagi dirinya, keluarga, institusi, masyarakat maupun bangsa.¹²

Pada Pesantren Salaf di Pameakasan, penyelenggaraan pendidikan agama Islam ini telah dilaksanakan dengan baik, baik ditinjau dari aspek kurikulum, Guru/ustad, media pembelajaran maupun dari sisi kebijakan pimpinan.

Kedua, Stadium General PAI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus Pesantren bagian Pendidik Agama Islam, biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Seluruh santri yang sedang mendapatkan mata harus mengikuti Pendidikan Agama Islam diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Materi yang disampaikan pada stadium general ini pada dasarnya bersifat aktual (isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan aliran anti-NKRI) diantaranya terkait dengan masalah eksistensi gerakan aliran sesat.¹³

Ketiga, Pengajian rutin. Pengajian ini diselenggarakan oleh pengurus bagian Pendidikan Agama Islam. Dalam prosesnya, pengajian ini ada yang

¹² Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000.

¹³ Profil PP. Syekh Abdurrahman, 2019

husus di peruntukkan bagi Santri yang baru menimba pendidikan di pesantren (dilaksanakan setiap hari senin, rabu, kamis dan jum'at pagi) dan ada pula yang khusus di peruntukkan bagi ustad/ustadzah, dan pengurus kependidikan (dilaksanakan setiap rabu pagi setelah pelaksanaan pengajian rutin selesai). Adapun jadwal pelaksanaannya biasanya dilaksanakan pada setiap hari rabu sehingga dikenal dengan istilah rabuan. Disamping itu, ada juga pengajian yang diselenggarakan oleh lembaga departemen atau jurusan yang materinya terkadang terkait langsung dengan masalah gerakan aliran sesat.

Keempat, Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah (MTA). Kegiatan ini di selenggarakan selama kurang lebih empat bulan (sekitar 13 belas pertemuan) oleh para aktivis Pesantren. Sasaran MTA ini diutamakan untuk santri baru yang telah menyelesaikan kuliah Pendidikan Agama Islam, jadi semacam follow up dari PAI. namun tidak menutup kemungkinan boleh diikuti oleh Santri lama karena kegiatan ini bersifat terbuka. Diantara tujuan di selenggarakan MTA ini adalah untuk meningkatkan tsaqofah para aktivis pesantren. Dalam tataran teknis sebelum kegiatan ini dimulai, pengurus MTA membuka pendaftaran secara online, kemudian peserta yang telah terdaftar dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (dibuat kelas). pengajar yang mengisi pada MTA ini adalah para pakar PAI dari berbagai pondok pesantren salaf di Pamekasan khususnya di Madura secara Umum. Adapun materinya meliputi Aqidah, Fiqh, Tazkiyatun nafs, Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya. Program ini sistemnya mirip dengan model pesantren kilat.¹⁴

Kelima, Pembinaan keagamaan di asrama. Pesantren memiliki asrama santri yang dapat menampung sekitar 100 santri. Seluruh Santri baru baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menempati asrama ini selama satu tahun. Selama berada di asrama Santri diberikan bermacam

¹⁴DKM Al-Hurriyyah, Materi Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah Periode Maret-Juni 2013).

kegiatan yang dapat meningkatkan kepribadian Santri antara lain pembinaan kerohanian. Bagi Santri yang pembinaan ini dikenal dengan istilah *Ngaji Lorong* atau *Ngaji Gedung* yaitu kegiatan ngaji bersama di asrama yang meliputi tausiah, tilawah dan kajian al-Qur'an yang dipandu oleh para pembimbing asrama yang dikenal dengan istilah *Senior Resident* (SR) di masing-masing asrama.

Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran aliran sesat di asrama, pembina asrama melalui pengajian gedung menyampaikan berbagai hal terkait organisasi yang dipandang sebagai kelompok aliran sesat dan menyesatkan. Santri diberikan pemahaman tentang gerakan dan bahayanya aliran sesat yang kerap mendatangkan kerugian baik secara materi maupun non materi.

Keenam, seminar keagamaan. Kegiatan ini sering dilakukan oleh para aktivis dakwah kampus, baik di tingkat Asrama maupun Pesantren, tingkat nasional maupun internasional. Dalam kegiatan seminar keagamaan ini, materi yang disampaikan cukup variatif dan bersifat aktual yang meliputi masalah aqidah, syariah, muamalah, politik, akhlak, organisasi keagamaan (termasuk organisasi aliran sesat dan menyesatkan) dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis data primer dan data sekunder, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: Pertama secara formal melalui asistensi yang harus dilakukan adalah dengan memberikan dan memperdalam kegiatan Pendidikan Agama Islam. Kedua memberikan stadium general PAI, hal ini merupakan lanjutan dari poin pertama sebagai pendalaman materi atau pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama islam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus Pesantren bagian Pendidik Agama Islam, biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Ketiga, Melalui pengajian rutin yang telah ditetapkan oleh pesantren,

hal ini adalah sebagai ciri khas pesantren salaf dengan model kajian kitab kuning. Keempat Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah (MTA) dengan kegiatan ini juga merupakan salah satu metode untuk mencegah paham aliran islam anti-NKRI yang dilakukan pada asrama-asrama yang berada di pesantren. Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah (MTA). Kegiatan ini diselenggarakan selama kurang lebih empat bulan (sekitar 13 belas pertemuan) oleh para aktivis Pesantren. Kelima, Pembinaan keagamaan di asrama. Pesantren memiliki asrama santri yang dapat menampung sekitar 100 santri. Seluruh Santri baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menempati asrama ini selama satu tahun upaya mudah untuk melakukan kontroling dan menjalankan pembinaan yang telah ditetapkan oleh pesantren sebagai salah satu cara untuk mencegah masuknya islam anti-NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP Undip, Semarang, 2007
- Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean, Pola-pola Konflik keagamaan di Indonesia (1990-2008), (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina (YWP)
- Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), Februari 2009
- Masdar Hilmy, at.al.18 *Membedah Anatomi Konflik Agama-Etnik: Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama Etnik PascaOrde Baru* (Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2004)

- Nurhadiantomo, *Hukum reintegrasi sosial konflik-konflik sosial pri-non pri dan hukum keadilan social* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)
- Sardy, Martin, *Agama multidimensional : kerukunan hidup beragama dan integritas nasional* (Bandung : Alumni, 1983)
- Setiawan, Chardra. [et al], *Direktori penelitian agama, konflik dan perdamaian* (Jakarta: Komnas HAM, 2005)
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Sudjangi, *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama, Studi Kasus Kerusuhan Ambon*. dalam Departemen agama RI, *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- Undangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
- Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya

Website

http://www.tempo.co/hg/layanan_publi/2010/08/22/brk,20100822-273047.id.html,